Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Di Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang

[1]Cici Aprilia, [2]Erfina, [3]Ahmad Mustanir,[4]Irwan
[1,2,3,4]Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Korespondensi : ciciaprilia507@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran PKK sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan kemandirian masyarakat di Desa Lasiwala yang sempat vakum selama dua tahun sebelum kembali aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran PKK dalam meningkatkan kemandirian masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian berjumlah sembilan orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PKK tercermin dalam tiga indikator, yaitu Penguatan Sosial dan Kelembagaan sebagai indikator yang paling dominan, Pendidikan dan Pelatihan yang telah terlaksana dengan cukup baik, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang masih belum optimal. Faktor pendukung utama meliputi modal sosial dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya meliputi rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan anggaran, dan terbatasnya jumlah kader. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKK Desa Lasiwala berperan cukup penting dalam mendukung kemandirian masyarakat, meskipun aspek pemberdayaan ekonomi keluarga masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Kata kunci: *Pemberdayaan, PKK, Kemandirian Masyarakat, Penguatan Kelembagaan*

Abstract

This study was motivated by the role of the Family Welfare Empowerment (PKK) organization as a partner of the village government in promoting community self-reliance in Lasiwala Village. The PKK had been inactive for two years before resuming its activities. Therefore, this study aimed to describe the role of PKK in enhancing community self-reliance and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This study employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Nine informants were selected using purposive sampling. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using NVivo 12 Plus software. The findings indicate that the role of PKK is reflected in three indicators: Social and Institutional Strengthening as the most dominant indicator, Education and Training, which has been implemented fairly well, and Family Economic Empowerment, which has not yet been optimal. The main supporting factors include social capital and community participation, while the inhibiting factors consist of low member participation, limited funding, and an insufficient number of cadres. It can therefore be concluded that the PKK of Lasiwala Village plays a significant role in supporting community self-reliance; however, the family economic empowerment aspect still requires further improvement.

Keyword: *Empowerment, PKK, Community Independence, Institutional Strengthening*

1. PENDAHULUAN

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat. Peran PKK tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga, tetapi juga menjadi wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kapasitas keluarga dalam mengambil keputusan secara mandiri. Pelaksanaan gerakan PKK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa tujuan utama gerakan PKK adalah meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dalam berbagai aspek, seperti sosial, budaya, dan partisipasi masyarakat, sekaligus menumbuhkan nilai kebersamaan serta semangat gotong royong di tengah masyarakat (Maduwinarti & Murti, 2021).

PKK berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui sepuluh program pokok PKK. Program-program tersebut berfokus pada peningkatan pendidikan dan keterampilan keluarga, pengelolaan kesehatan masyarakat, serta penguatan kapasitas keluarga agar mampu bersikap dan bertindak secara mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, pemberdayaan masyarakat melalui PKK merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri menuju keluarga yang beriman, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri (Pathony, 2020). Oleh karena itu, PKK tidak hanya menjadi wadah bagi kegiatan perempuan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang berlandaskan partisipasi aktif warga.

Desa Lasiwala yang terletak di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan wilayah dengan karakteristik agraris dan semi-perdesaan. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perkebunan, serta usaha mikro rumah tangga. Potensi lokal tersebut menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pemberdayaan keluarga. Namun, keterbatasan sumber daya manusia serta lemahnya kelembagaan sosial masih menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian masyarakat secara optimal. Berdasarkan hasil observasi awal, PKK Desa Lasiwala yang dibentuk pada 13 Januari 2020 pernah mengalami kevakuman kegiatan selama kurang lebih dua tahun sebelum kembali aktif melaksanakan berbagai program pada saat penelitian dilakukan. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan lebih optimal.

Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap publikasi ilmiah periode 2019–2025 yang membahas pemberdayaan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan pembangunan masyarakat mengidentifikasi empat tema utama penelitian terdahulu, yaitu dinamika gender dan peran perempuan, program pemberdayaan serta kebijakan pemerintah daerah, pendekatan edukatif dan partisipatif, serta kesejahteraan dan kerentanan keluarga. Meskipun demikian, hasil analisis tersebut belum secara eksplisit mengkaji konsep kemandirian masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan adanya *research gap* terkait hubungan langsung antara pemberdayaan keluarga melalui PKK dengan peningkatan kemandirian masyarakat, khususnya pada desa yang pernah mengalami kevakuman kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada pemberdayaan masyarakat melalui PKK karena pelaksanaannya mencerminkan tata kelola partisipatif dalam administrasi publik sekaligus menjadi penghubung antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan PKK memiliki peran yang penting dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan keluarga serta meningkatkan kemandirian masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran PKK dalam meningkatkan kemandirian masyarakat di Desa Lasiwala serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

peran PKK dalam meningkatkan kemandirian masyarakat di Desa Lasiwala, sekaligus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat pelaksanaan peran PKK. Dari sisi teoritis, penelitian ini bertujuan menguji kesesuaian teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Zimmerman dan Suharto dengan pelaksanaan program PKK di tingkat desa. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan TP-PKK dalam menyusun strategi yang lebih efektif guna meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat peran PKK dalam pemberdayaan keluarga dan peningkatan kemandirian masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran PKK dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang selama empat bulan, mulai November 2025 hingga Maret 2026. Pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, pengolahan data, analisis data, serta penyusunan laporan akhir. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu memberikan pemahaman mengenai makna, proses, dan dinamika sosial yang berlangsung secara alami di lingkungan masyarakat tanpa adanya perlakuan tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sugiyono (2017) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme serta menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses penelitian.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek, yaitu gerakan PKK dalam pemberdayaan masyarakat dan kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian masyarakat. Gerakan PKK dianalisis melalui tiga subfokus, yaitu penguatan sosial dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Adapun kontribusi PKK terhadap kemandirian masyarakat dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan secara mandiri, mengambil keputusan secara mandiri, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa. Informan penelitian berjumlah sembilan orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri atas Ketua TP-PKK (1 orang), Sekretaris PKK (1 orang), Kepala Desa (1 orang), tokoh masyarakat dan tokoh perempuan (2 orang), serta warga penerima manfaat program PKK (4 orang). Pengumpulan data dihentikan setelah mencapai titik jenuh (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menghasilkan temuan baru.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi terhadap kondisi PKK dan tingkat partisipasi masyarakat, serta dokumentasi yang meliputi profil desa, arsip kegiatan PKK, dan berbagai referensi pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2017). Proses analisis didukung oleh perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk melakukan pengodean (coding), penyusunan matriks, dan visualisasi hubungan antarkode. Keabsahan data diuji berdasarkan empat kriteria, yaitu kredibilitas melalui triangulasi sumber dan teknik, transferabilitas dengan penyajian deskripsi konteks penelitian secara rinci, dependabilitas melalui penelusuran proses penelitian yang sistematis, serta konfirmabilitas untuk menjamin objektivitas hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa tersebut merupakan wilayah agraris yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Berdasarkan data kependudukan tahun 2026, Desa Lasiwala memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.029 jiwa yang tersebar di empat dusun dengan total 531 Kepala Keluarga. Komposisi penduduk terdiri atas 1.021 laki-laki (50,32%) dan 1.008 perempuan (49,68%), sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Lasiwala Berdasarkan Wilayah Tahun 2026

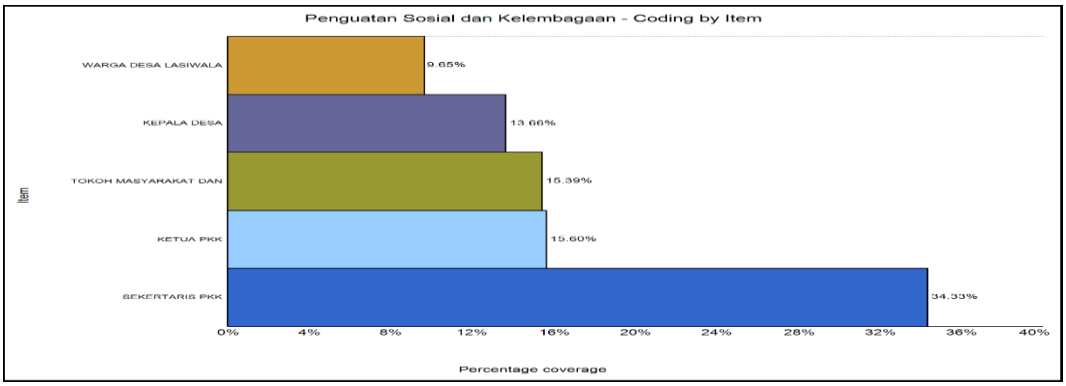
No	Wilayah	KK	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1	Dusun I	235	893	442	451
2	Dusun II	155	571	289	282
3	Dusun III	101	405	205	200
4	Dusun IV	40	160	85	75
	Total	**531**	**2.029**	**1.021**	**1.008**

Sumber: Profil Desa Lasiwala Tahun 2026

Dusun I merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 893 jiwa, sedangkan Dusun IV memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 160 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang menunjukkan potensi sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemberdayaan oleh PKK. Selama perkembangannya, PKK Desa Lasiwala sempat mengalami kevakuman kegiatan selama kurang lebih dua tahun. Namun, pada saat penelitian dilaksanakan, organisasi tersebut telah kembali aktif menyelenggarakan berbagai program, seperti penyuluhan kesehatan, posyandu, pembinaan keluarga, kerja bakti, dan Jumat Bersih. Meskipun demikian, pelaksanaan beberapa kegiatan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan waktu yang dimiliki anggota serta rendahnya tingkat kehadiran masyarakat pada kegiatan tertentu.

Peran PKK dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat

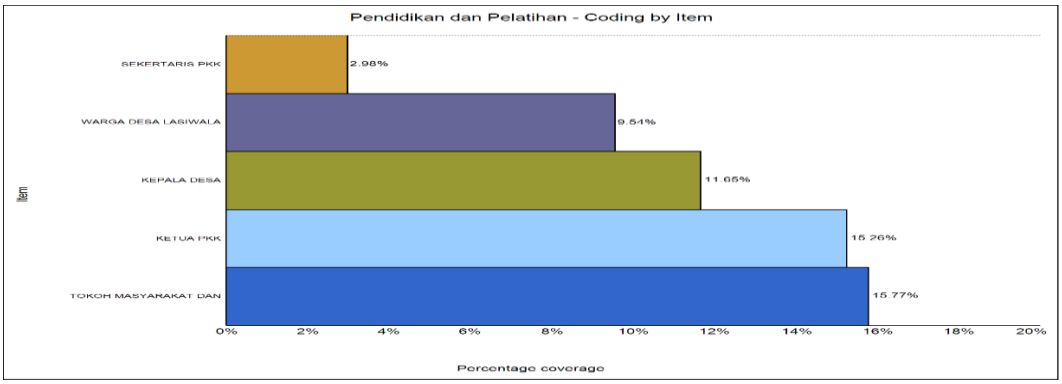
Hasil analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus menunjukkan bahwa peran PKK di Desa Lasiwala dikelompokkan ke dalam tiga indikator utama, yaitu Penguatan Sosial dan Kelembagaan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Ketiga indikator tersebut dihasilkan melalui proses coding terhadap data hasil wawancara dari seluruh informan. Adapun hasil analisis coding by item pada setiap indikator disajikan pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 3.



Gambar 1. Penguatan Sosial dan Kelembagaan

Sumber: Data Diolah dengan NVivo 12 Plus, 2026

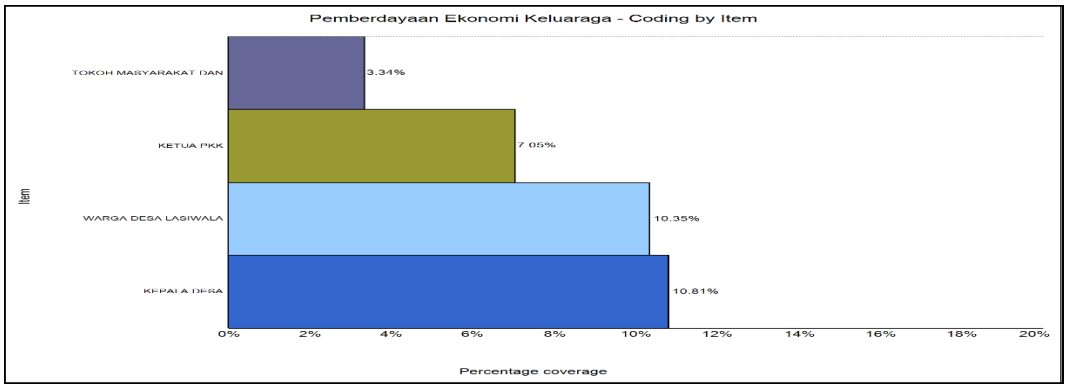
Pada indikator Penguatan Sosial dan Kelembagaan, kontribusi terbesar berasal dari Sekretaris PKK sebesar 34,33%, kemudian diikuti oleh Ketua PKK (15,60%), Tokoh Masyarakat (15,39%), Kepala Desa (13,66%), dan warga (9,65%). Kepala Desa Lasiwala mengungkapkan bahwa setelah PKK kembali aktif, masyarakat, khususnya kaum ibu, mulai lebih berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong maupun penyuluhan yang diselenggarakan di desa. Pernyataan tersebut didukung oleh Ketua PKK yang menjelaskan bahwa pelaksanaan gotong royong dan pertemuan rutin telah mempererat hubungan antarmasyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa aktifnya kembali PKK berkontribusi terhadap penguatan hubungan sosial sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kelembagaan di desa.



Gambar 2. Pendidikan dan Pelatihan

Sumber: Data Diolah dengan NVivo 12 Plus, 2026

Pada indikator Pendidikan dan Pelatihan, PKK melaksanakan berbagai kegiatan, seperti penyuluhan pola asuh anak melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), penyuluhan gizi keluarga, serta penyuluhan kesehatan ibu dan anak yang bekerja sama dengan puskesmas setempat. Kontribusi terbesar pada indikator ini berasal dari tokoh masyarakat dan tokoh perempuan sebesar 15,77%, kemudian diikuti oleh Ketua PKK (15,26%), Kepala Desa (11,65%), warga penerima manfaat (9,54%), dan Sekretaris PKK (2,98%). Salah seorang warga penerima manfaat mengungkapkan bahwa penyuluhan gizi membantunya memahami pentingnya pemenuhan makanan sehat bagi keluarga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program PKK memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pola asuh anak dan pemenuhan gizi keluarga.



Gambar 3. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Sumber: Data Diolah dengan NVivo 12 Plus, 2026

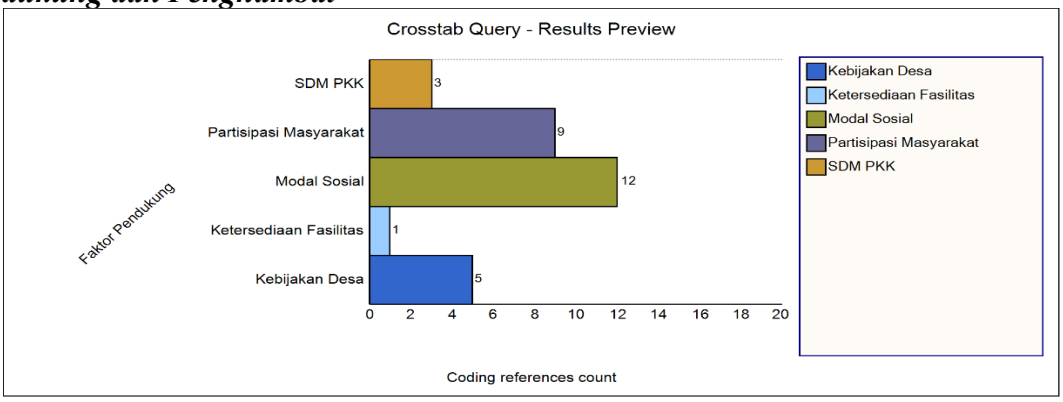
Pada indikator Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, PKK melaksanakan program penanaman sayuran di pekarangan rumah. Kontribusi terbesar pada indikator ini berasal dari Kepala Desa (10,81%) dan warga penerima manfaat (10,35%), sedangkan Sekretaris PKK tidak memiliki *coding reference* pada indikator tersebut. Kepala Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Di sisi lain, salah seorang warga penerima manfaat mengungkapkan bahwa hingga saat ini ia masih menanam cabai secara mandiri di pekarangan rumah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi keluarga lebih banyak melibatkan pihak yang berperan dalam perumusan kebijakan serta masyarakat sebagai penerima manfaat program. Sementara itu, keterlibatan pengurus PKK pada indikator ini masih relatif terbatas, sejalan dengan pelaksanaan program ekonomi yang belum berlangsung secara optimal setelah PKK kembali aktif pascakevakuman.

Secara umum, hasil analisis *coding by item* memperlihatkan adanya perbedaan pola kontribusi pada setiap indikator. Pada indikator Penguatan Sosial dan Kelembagaan, kontribusi didominasi oleh Sekretaris PKK, sedangkan pada indikator Pendidikan dan Pelatihan kontribusi antarinforman cenderung lebih merata. Sementara itu, pada indikator Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, kontribusi terbesar berasal dari Kepala Desa dan warga penerima manfaat. Capaian yang lebih tinggi pada aspek sosial dibandingkan aspek ekonomi menunjukkan bahwa PKK baru kembali aktif setelah mengalami kevakuman selama kurang lebih dua tahun. Kondisi tersebut menyebabkan dampak yang lebih cepat dirasakan masyarakat berupa pulihnya interaksi sosial, sedangkan perubahan pada aspek ekonomi memerlukan waktu yang lebih lama untuk terlihat. Menurut Zimmerman (1995) dalam Jabbar et al. (2023), pemberdayaan organisasi ditandai dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi sosial. Kondisi tersebut tercermin pada PKK Desa Lasiwala dan sejalan dengan temuan Herlina (2019) serta Fathy (2019) yang menyatakan bahwa modal sosial merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan program PKK di tingkat desa.

Program pendidikan yang dilaksanakan PKK Desa Lasiwala masih berorientasi pada penyuluhan kesehatan dan pola asuh anak, serta belum mencakup pengembangan keterampilan ekonomi produktif bagi masyarakat. Suharto (2005) dalam Afriansyah et al. (2023) menyatakan bahwa penguatan kapasitas masyarakat seharusnya juga diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam mengatasi permasalahan ekonomi secara mandiri. Oleh karena itu, program pendidikan PKK perlu dikembangkan agar tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas dalam kehidupan keluarga, tetapi juga mendukung penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat melalui kebiasaan menanam sayuran di pekarangan rumah, meskipun masih dalam skala terbatas, menunjukkan adanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara mandiri sebagaimana dijelaskan oleh Zimmerman (1995) dalam Jabbar et al. (2023). Namun demikian, keterbatasan

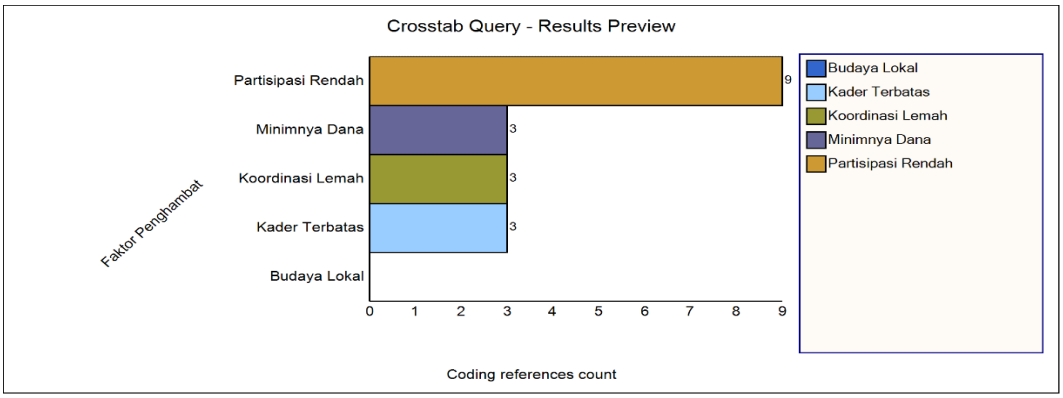
anggaran dan jumlah kader masih menjadi kendala sehingga PKK belum mampu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang lebih beragam, seperti pelatihan UMKM berbasis potensi lokal.

Faktor Pendukung dan Penghambat



Gambar 4. Faktor Pendukung Peran PKK
Sumber: Data Diolah dengan NVivo 12 Plus, 2026

Hasil analisis *crosstab query* terhadap lima variabel pendukung menunjukkan bahwa Modal Sosial menjadi faktor yang paling dominan dengan 12 *coding reference*. Selanjutnya, diikuti oleh Partisipasi Masyarakat (9), Kebijakan Desa (5), sedangkan SDM PKK dan Ketersediaan Fasilitas memiliki jumlah *coding reference* yang lebih rendah. Ketua PKK mengungkapkan bahwa dukungan dari Kepala Desa, semangat para pengurus, serta kerja sama antaranggota memberikan kontribusi penting terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan PKK Desa Lasiwala dalam kembali aktif setelah mengalami kevakuman lebih banyak didukung oleh kekuatan internal masyarakat berupa kepercayaan dan jaringan sosial daripada faktor eksternal, seperti kebijakan maupun ketersediaan fasilitas. Sejalan dengan hal tersebut, Putnam (1993) dalam Fathy (2019) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan penggerak awal partisipasi masyarakat, namun tetap memerlukan penguatan kelembagaan agar mampu menghasilkan dampak yang optimal dan berkelanjutan.



Gambar 5. Faktor Penghambat Peran PKK
Sumber: Data Diolah dengan NVivo 12 Plus, 2026

Hasil analisis terhadap faktor penghambat menunjukkan bahwa Partisipasi Rendah merupakan faktor yang paling dominan dengan 9 *coding reference*. Selanjutnya, faktor Minimnya Dana, Koordinasi Lemah, dan Kader Terbatas masing-masing memiliki 3 *coding reference*, sedangkan Budaya Lokal tidak menunjukkan adanya *coding reference*. Ketua PKK mengungkapkan bahwa kendala utama dalam

pelaksanaan program meliputi keterbatasan anggaran, jumlah kader yang masih sedikit, serta kehadiran anggota yang belum konsisten karena kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Menurut Suharto (2005) dalam Afriansyah et al. (2023), melalui pendekatan 5P, keberhasilan pemberdayaan memerlukan unsur penyokongan dan pemeliharaan berupa dukungan serta pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi di PKK Desa Lasiwala karena keterbatasan kader, anggaran, dan koordinasi yang saling memengaruhi. Sementara itu, tidak ditemukannya *coding reference* pada faktor Budaya Lokal menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lasiwala memiliki penerimaan yang baik terhadap program PKK, sehingga hambatan yang dihadapi lebih bersifat struktural dan berpotensi diatasi melalui penguatan sumber daya.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lasiwala mulai memperlihatkan bentuk kemandirian perilaku sebagaimana dikemukakan oleh Steinberg (2002) dalam Tresnawati et al. (2021), yang ditandai dengan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial, serta memenuhi kebutuhan keluarga tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak lain. Sejalan dengan itu, Mut'adin (2002) dalam Tresnawati et al. (2021) menyatakan bahwa kemandirian terbentuk melalui proses penyesuaian diri individu terhadap lingkungan sekitarnya. Proses tersebut tercermin pada masyarakat Desa Lasiwala melalui keterlibatan aktif dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh PKK.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan tidak berlangsung secara seragam pada setiap indikator. Pulihnya fungsi sosial PKK yang lebih cepat dibandingkan fungsi ekonomi mengindikasikan bahwa penguatan kelembagaan merupakan tahapan awal yang perlu diwujudkan sebelum pelaksanaan program diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih substansial. Kondisi tersebut sesuai dengan karakteristik Desa Lasiwala yang baru kembali aktif setelah mengalami kevakuman kelembagaan selama dua tahun. Akibatnya, capaian yang bersifat relasional dan kolektif, seperti kegiatan gotong royong dan pertemuan rutin, lebih mudah diwujudkan kembali dibandingkan capaian yang bersifat individual dan memerlukan waktu lebih panjang, seperti pemberdayaan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, strategi penguatan PKK pada masa mendatang perlu dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mempertahankan capaian pada aspek penguatan sosial, sekaligus mengembangkan program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi produktif rumah tangga secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

PKK Desa Lasiwala berperan penting dalam meningkatkan kemandirian masyarakat melalui tiga indikator utama, yaitu Penguatan Sosial dan Kelembagaan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Di antara ketiga indikator tersebut, Penguatan Sosial dan Kelembagaan menunjukkan capaian yang paling menonjol, yang ditandai dengan kembali aktifnya kegiatan gotong royong, pertemuan rutin, serta terbangunnya kembali jejaring sosial antarmasyarakat setelah PKK mengalami kevakuman selama dua tahun. Pada indikator Pendidikan dan Pelatihan, pelaksanaan program telah berjalan dengan cukup baik melalui penyuluhan kesehatan dan pola asuh anak, meskipun belum mencakup pengembangan keterampilan ekonomi produktif. Sementara itu, indikator Pemberdayaan Ekonomi Keluarga masih menunjukkan capaian yang relatif paling rendah karena pelaksanaan program belum berlangsung secara optimal setelah PKK kembali aktif. Keberhasilan pelaksanaan peran PKK didukung oleh modal sosial dan partisipasi masyarakat sebagai faktor utama, sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya partisipasi anggota akibat kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, yang turut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, serta terbatasnya jumlah kader PKK.

5. SARAN

Pemerintah Desa Lasiwala diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap PKK secara terencana dan berkesinambungan, baik melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana, maupun pembinaan bagi pengurus, sehingga program pemberdayaan yang telah kembali berjalan dapat terus berlanjut dan terhindar dari kevakuman di masa mendatang. Pengurus PKK Desa Lasiwala perlu meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan secara berkala, memperkuat koordinasi internal, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang lebih bervariasi, seperti pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal, mengingat aspek tersebut masih menunjukkan capaian yang paling rendah. Masyarakat Desa Lasiwala juga diharapkan meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif dalam setiap kegiatan PKK karena keterlibatan yang berkesinambungan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan dan terwujudnya kemandirian masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program PKK, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pelatihan UMKM berbasis potensi lokal, serta menerapkan pendekatan longitudinal guna mengamati perkembangan kemandirian masyarakat Desa Lasiwala dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Afriansyah, Afdhal; Mustanir, Ahmad; Faried, Annisa Ilmi; Mursalat, Aksal; Kusnadi, Iwan Henri; Fauzan, Rusydi; Amruddin; Siswanto, Duwi; Widiyawati, R. A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. PT Global Eksekutif Teknologi.

[2]. Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiolog*, *3*(2).

[3]. Herlina, H. (2019). Fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Maasawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, *5*(2), 201–212.

[4]. Jabbar, A., Shodiqin, A., & Enjang. (2023). Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Industri Rumahan Batik. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *8*(1), 1–26.

[5]. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

[6]. Maduwinarti, Ayun; Murti, I. (2021). Penyuluhan PKK di Desa Tasik Madu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, *1*(2), 28–33.

[7]. Pathony, T. (2020). Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *Ijd-Demos*, *1*(2), 262–289. https://doi.org/10.31506/ijd.v1i2.23

[8]. Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

[9]. Tresnawati, R., Octavia, E., Herawati, S. D., & Latif, D. V. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Menuju Ke Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Mandirian. *Jurnal Inovasi Masyarakat*, *01*(03), 252–259.